



Article Informations
Corresponding Email:
rayzidhnie@gmail.com

Received: 31/01/2025; Accepted:
11/02/2025; Published: 30/06/2025

PERAN ADVOKASI MIGRANT CARE DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRANT INDONESIA DI MALAYSIA TAHUN 2017- 2022

Muhammad Rayhan Zidhnie

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Migrant Care merupakan organisasi yang berdiri karena adanya keprihatinan terhadap permasalahan yang terjadi bagi para pekerja migran yang menghadapi masalah secara hukum. Penelitian ini mengkaji mengenai peran Migrant Care sebagai lembaga yang menjalankan advokasi dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menganalisis strategi advokasi, capaian serta berbagai tantangan yang dihadapi Migrant Care dalam melindungi berbagai hak pekerja migran Indonesia. Lebih lanjut, untuk menjelaskan hal tersebut penelitian ini menggunakan konsep peran organisasi internasional dari Clive Archer untuk menjelaskan bagaimana peran Migrant Care dalam melakukan berbagai upaya untuk melindungi hak para pekerja migran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Migrant Care memiliki dampak signifikan dalam memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia, meskipun masih terdapat berbagai kendala sistemik yang perlu diatasi melalui kolaborasi lebih intensif dengan berbagai pihak.

Kata kunci: Migrant Care, Advokasi, Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Tenaga kerja

Abstract

Migrant Care is an organization that was established due to concerns about the problems that occur for migrant workers who face legal problems. This study examines the role of Migrant Care as an institution that carries out advocacy in efforts to protect Indonesian migrant workers in Malaysia. Using qualitative

methods and a case study approach, this study analyzes advocacy strategies, achievements and various challenges faced by Migrant Care in protecting the rights of Indonesian migrant workers. Furthermore, to explain this, this study uses the concept of the role of international organizations from Clive Archer to explain how Migrant Care plays a role in making various efforts to protect the rights of migrant workers. This study concludes that Migrant Care has a significant impact in strengthening the protection of Indonesian migrant workers in Malaysia, although there are still various systemic obstacles that need to be addressed through more intensive collaboration with various parties.

Keywords: *Migrant Care, Advocacy, Indonesian Migrant Workers, Workforce Protection*

PENDAHULUAN

Keterlibatan Pekerja Migran Indonesia menjadi faktor yang dominan seiring kemiskinan yang mendorong warga Indonesia untuk memilih bekerja di luar negeri. Langkah yang diambil menjadi bercabang seiring hasil yang diraih tidak berbanding lurus dengan peningkatan taraf kehidupan bagi masing-masing pekerja serta munculnya berbagai permasalahan yang kemudian menimpa pekerja migran Indonesia.¹ Dalam hal ini tuntutan dari situasi ketenagakerjaan, demografi sosial, ekonomi dan era globalisasi menjadi alasan tingginya angka pekerja migran Indonesia. Permasalahan ekonomi menjadi hal yang paling sering didengar di Indonesia yang disebabkan oleh tingginya sumber daya manusia namun belum meratanya lapangan pekerjaan sehingga dengan tidak diimbangnya hal tersebut mengakibatkan banyak permasalahan muncul. Oleh karena itu banyak warga negara Indonesia mencoba peruntungan baru di negara lain menjadi pekerja migran.

Jumlah migran Indonesia secara resmi yang dihitung oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada tahun 2022 sendiri

¹Sumardiani, F., & Pengelola Ahli Teknologi Pertanian, B. (2014). *Peran Serikat Buruh Migran Indonesiadalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>

telah mencapai sekitar 4,4 juta orang.² Perbedaan kurs mata uang dan segi kelayakan dalam bekerja di negara lain yang menjadi pemikiran bagi mereka yang ingin berusaha memiliki kehidupan yang lebih layak, namun kekurangan Indonesia terhadap kualitas yang dimiliki untuk mampu bersaing diyakini cukup sulit, dikarenakan pendidikan dan kesejahteraan penduduk yang rendah sehingga banyak pekerja migran yang bekerja tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

Berbagai macam permasalahan yang dialami oleh Indonesia dalam upaya melakukan migrasi bagi para pekerja migran, persiapan yang dilakukan bagi para pekerja sebelum keberangkatan dan informasi lainnya perlu disiapkan seperti: kemampuan berbahasa, pengenalan budaya dan kebiasaan hidup sehari-hari, pengetahuan umum tentang peraturan yang berlaku dan politik yang dijalankan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya masalah yang tidak diinginkan oleh para pekerja migran.³ Beberapa permasalahan hukum akan bermunculan apabila para pekerja migran tidak diberikan perlindungan, upaya yang dilakukan dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya selama bekerja dan selepas kerja baik dari hukum, harkat dan martabat, ekonomi dan sosial. Sebelum bekerja para pekerja migran diberikan perlindungan sejak pendaftaran dalam bentuk penyelesaian dokumen dan pemberangkatan yang memerlukan pengawasan dari negara Indonesia.

Dengan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memberangkatkan pekerja migran, Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 perihal Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (UU PPTKILN), pada pasal 5 dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut bahwa pemerintah bertugas mengatur, membina,

²*Launching Skema Baru KUR Bagi PMI, Menko Airlangga Sebut Pekerja Migran Indonesia Sebagai Pahlawan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.* (n.d.). Retrieved May 17, 2022, from <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3924/launching-skema-baru-kur-bagi-pmi-menko-airlangga-sebut-pekerja-migran-indonesia-sebagai-pahlawan>

³*Upaya Migrant Care Dalam Mendorong Penyelesaian Kasus Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Tahun 2014-2016 (Studi Kasus: Wilfrida Soik) - Repositori Universitas Kristen Indonesia.* (n.d.). Retrieved May 17, 2022, from <http://repository.uki.ac.id/3260/>

melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.⁴

Pekerja Migran Indonesia dapat dijelaskan sebagai warga negara yang akan, sedang atau telah menerima upah diluar wilayah Indonesia berdasarkan Undang-Undang no 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.⁵ *Migrant Care* memberi tanggapan terkait pengesahan UU tersebut dimana perlindungan pekerja migran Indonesia mengalami kemajuan dalam beberapa aspek dibanding dengan undang-undang sebelumnya, hal ini menjadi catatan yang baik mengingat perubahan revisi terhadap undang-undang ini memakan waktu kurang lebih 7 tahun, sehingga perlu dilakukan perhatian dalam mengimplementasikannya.⁶

Walau tidak tertulis tentang bagaimana penyelesaian masalah berdasarkan asas kemanusiaan dan keadilan yang berlakubagi para migran, serta hukum dari hak para pekerja migran atas undang-undang yang berlaku masih kurang memadai dan melindungi terhadap kekerasan yang dialami serta kurangnya pembelaan, faktor tersebut telah diamati oleh organisasi *Migrant Care* selama mendampingi para pekerja dalam menghadapi masalah dan kesulitan.

Migrant Care telah didirikan sejak 22 juni 2004 sebagai upaya keprihatinan terhadap permasalahan yang terjadi bagi para pekerja migran yang menghadapi masalah secara hukum. Dengan adanya keterbatasan yang dimiliki oleh pekerja migran Indonesia dalam upaya memenuhi ketersediaan dan kebutuhannya, Adapun organisasi ini bergerak dalam memenuhi isu perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dalam melakukan

⁴UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved May 18, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40786/uu-no-39-tahun-2004>

⁵UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved May 17, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64508>

⁶Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (n.d.). Retrieved May 18, 2022, from <https://migrantcare.net/2017/12/undang-undang-no-18-tahun-2017-tentang-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>

advokasi dalam memperkuat jaringan di berbagai tingkatan untuk memastikan kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan apa yang telah di terapkan, bantuan hukum serta layanan konseling dalam membantu menangani kasus bila terjadi pelanggaran hukum bagi pekerja migran, penelitian dilakukan sebagai bentuk bukti nyata dalam membangun pengetahuan yang luas bagi pekerja migran, dan pendidikan untuk memperkuat kesadaran kritis dan pengetahuan tentang hak-hak sebagai pekerja demi memajukan keadilan global.⁷

Migran Care terbentuk berdasarkan keprihatinan terhadap nasib PMI yang sering mengalami masalah terkait pelanggaran HAM. Dalam hal ini *Migrant Care* aktif memperjuangkan hak-hak PMI, dan menjalin kerjasama dengan LSM, pemerintah dan lembaga kemanusiaan lainnya. *Migrant Care* memiliki program yang mengatur tentang penguatan kerjasama dan advokasi terhadap pekerja migran, dengan program ini memperlihatkan bahwa *Migrant Care* memiliki perhatian khusus terhadap visi dan misi serta tujuan terhadap pekerja migran yang akan di khususnya di Malaysia. Karena seiring berjalannya waktu Pekerja Migran Indonesia terus mengalami kenaikan, Menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, pada tahun 2018 jumlah Pekerja Migran Indonesia untuk Malaysia sebanyak 90.671.⁸

Pekerja Migran Indonesia yang berada di Malaysia memiliki hubungan yang kurang baik dengan majikan atau boss dengan berbagai macam jenis masalah yang dihadapi, bisa dilihat juga dari data yang telah dikeluarkan BNP2TKI dimana jumlah pengaduan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia pada tahun 2018 terdapat 3.133 kasus. Sebagai upaya advokasi dalam penegakan hak-hak Pekerja Migran Indonesia, *Migrant Care* membuka cabangnya di Kuala Lumpur, dengan adanya kantor ini menjadi tempat untuk membantu Pekerja Migran Indonesia dalam mendapatkan informasi mengenai isu pekerja migran dan tempat berkumpul.⁹ Adapun kegiatan yang

⁷Landing - *Migrant CARE*. (n.d.). Retrieved May 17, 2022, from <https://migrantcare.net/>

⁸BNP2TKI • *Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Tahun 2018*. (n.d.). Retrieved May 18, 2022, from <http://portal.bnp2tki.go.id/read/14133/Data-Penempatan-dan-Perlindungan-TKI-Periode-Tahun-2018.html>

⁹*Upaya Migrant Care Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia (2014-2019) - Umm Institutional Repository*. (N.D.). Retrieved May 18, 2022, From <https://Eprints.Umm.Ac.Id/70617/>

dilakukan seperti menggelar kegiatan mengenai Sosialisasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, dibukanya forum ini membantu para pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia untuk mengetahui informasi-informasi terbaru tentang perundang-undangan terbaru terkait perlindungan pekerja migran.¹⁰

Adanya kedekatan geografis antara Indonesia dan Malaysia dan jumlah Pekerja migran Indonesia yang sangat tinggi di negara Malaysia, akses yang dimiliki untuk penyebaran informasi akan lebih mudah dan pengawasan terhadap pekerja migran akan lebih terlindungi, melihat dari tingginya kasus yang terjadi seperti tindakan yang dilakukan oleh warga Indonesia terhadap Pekerja Migran Indonesia dapat dikatakan kurang manusiawi, banyak dari warga Malaysia yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia yang dianggap merendahkan, masalah yang sering dijumpai pada pekerja migran di Malaysia adalah kasus deportasi, kekerasan dan eksploitasi.¹¹

Berbagai upaya yang dilakukan dalam *Migrant Care* terhadap penyelesaian masalah bagi pekerja migran terus dilakukan, melihat dari banyaknya portal berita yang menjelaskan tentang keikutsertaan *Migrant Care* dalam berbagai diskusi perihal nota kesepahaman yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia. Advokasi yang dilakukan oleh *Migrant Care* dinilai mampu menggiring opini perihal kekuatan dari kebijakan yang dibuat sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja migran tersebut.

Indonesia dan Malaysia telah menyepakati *Memorandum of Understanding* (MoU) terbaru pada tanggal 1 April 2022 tentang Penetapan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. Penjelasan dari presiden soal MoU ini adalah tentang penggunaan sistem satu kanal yang dibuat sebagai bentuk perekrutan dan pengawasan, sistem ini diyakini mampu memberi perlindungan maksimal bagi PMI.¹² Saat ini

¹⁰*Migrant CARE Kuala Lumpur Gelar Sosialisasi tentang Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia*. (n.d.). Retrieved May 18, 2022, from <https://migrantcare.net/2018/04/sosialisasi-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-kuala-lumpur-2018/>

¹¹*Upaya Preventif Dalam Menekan Insiden Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Melalui Hubungan Bilateral Indonesia Dan Malaysia | Dikshi (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional)*. (N.D.). Retrieved May 18, 2022, From <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/52462?articlesbyauthorpage=4>

¹²Indonesia-Malaysia Sepakati MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia | Sekretariat Negara. (n.d.). Retrieved May 18, 2022, from

Migrant Care belum memberikan pemaparan dan tanggapan dari MoU yang telah disepakati dilihat dari situs *Migrant Care* itu sendiri. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai “Peran *Migrant Care* dalam upaya advokasi terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia”. Dalam hal ini perlu penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk apa saja yang telah dilakukan oleh *Migrant Care* serta pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia sebagai salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan *Migran Care* dalam memberikan Advokasi untuk membantu korban dalam proses keadilan tersebut.

PEMBAHASAN

Peran Advokasi Migrant CARE dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Tahun 2017-2022

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh Institusi internasional bisa dijadikan sebagai panduan yang dapat mengkategorikan organisasi internasional tersebut. Institusi internasional memiliki berbagai peran yang dimainkan pada sistem dan fungsi yang dimiliki oleh Institusi internasional tersebut. Pada dasarnya setiap institusi internasional memiliki peran dan fungsi yang berbeda serta terbatas, akan tetapi di sisi lain terdapat juga institusi internasional yang memiliki peran dan fungsi yang lebih luas. Clive Archer menjelaskan dalam bukunya tiga peran utama yang dimiliki oleh organisasi internasional.

4.1. Migrant CARE sebagai Instrumen yang melindungi Pekerja Migran Indonesia

Organisasi internasional merupakan alat yang dapat dimanfaatkan oleh anggotanya untuk mencapai berbagai tujuan dengan menyelaraskan tindakan dari berbagai anggota organisasi tersebut demi tercapainya tujuan yang ditetapkan. Disamping itu organisasi internasional juga dapat

dimanfaatkan sebagai sarana untuk menekan intensitas konflik yang sedang terjadi pada sistem internasional. Tentunya ini bukan tanpa kekurangan dimana seringkali anggota sebuah organisasi internasional yang memiliki power yang cukup besar akan berebut untuk memanfaatkan organisasi yang secara langsung akan membatasi tindakan dan gerak dari organisasi tersebut.

A. Upaya Migrant CARE dalam melakukan advokasi

Migrant CARE menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam upaya advokasi buruh migran yang menghadapi berbagai masalah di luar negeri. Adapun berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh Migrant CARE.

1. Advokasi & Kebijakan

Migrant Care merupakan organisasi non-pemerintah dimana dalam menjalankan perannya dalam hal melakukan advokasi dilakukan dengan pendampingan dan juga mengawasi kepentingan objeknya.¹³ Peran advokasi pada NGO merupakan penyeimbang atau alternatif dari penyedia layanan.¹⁴ Salah satu upaya yang dilakukan oleh *Migran Care* dalam mengadvokasi kasus pekerja migran adalah dengan mendesak pemerintah dalam memfasilitasi undang-undang sebagai landasan hukum untuk perlindungan buruh migran serta berlangsungnya migrasi yang aman. Pada tahun 2017 revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri berhasil direvisi atas upaya *Migran Care* menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).¹⁵ Hal ini dilakukan karena *Migrant Care* menganggap undang-undang yang telah ada sebelumnya belum memberikan perlindungan sepenuhnya kepada pekerja migran Indonesia. Serta mendesak pemerintah agar merevisi undang-undang PMI yang baru dengan mengutamakan pada perlindungan pekerja migran Indonesia diserahkan pada pemerintah

¹³Katie Willis. 2005: Theories and Practices of Development. USA and Canada: Routledge. Hal 102

¹⁴David Lewis dan Nazneen Kanji. 2009: Non-Governmental Organization and Development. Routledge. Hal 91

¹⁵MAMPU. Meningkatkan Kondisi Migrasi Buruh Perempuan ke Luar Negeri. Pada <http://mampu.bappenas.go.id/tema/perlindungan-buruh-migran/> diakses pada 20 Juni 2024.

baik pusat maupun daerah, dimulai dari sebelum hingga sesudah bekerja. Karena pada dasarnya pada undang-undang yang telah ada sebelumnya dianggap belum memenuhi kebutuhan dalam hal perlindungan pekerja migran di luar negeri serta belum mengatur secara jelas bagaimana pengaturan pembagian tugas hingga wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak swasta secara proporsional.

Pada undang-undang yang telah direvisi terdapat desentralisasi perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yaitu dengan adanya tuntutan terhadap pemerintah daerah melalui peran besar dalam mengurus dan melindungi pekerja migran dimulai dari perekrutan. Selanjutnya perubahan lain ada pada peran besar dari atas ketenagakerjaan, asuransi pekerja migran Indonesia ditangani pemerintah, hingga sanksi berat bagi para pelanggar undang-undang.¹⁶ Migrant CARE memberikan bantuan dan advokasi kepada pekerja migran yang menjadi korban di luar negeri dengan menekankan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh masing-masing pekerja migran. Pada dasarnya pekerja migran banyak menjadi korban perdagangan manusia dan eksploitasi karena adanya kerentanan situasi di negara asal dan juga karena adanya ketidakpastian perlindungan di negara penerima. Peran Migrant CARE tidak terbatas sebagai penyedia layanan dasar saja, akan tetapi juga memiliki peran besar dalam melakukan advokasi dengan tujuan untuk melindungi hak serta kesejahteraan para pekerja migran.

Migrant CARE memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan pemerintah mengenai pekerja migran. Kerjasama dengan pemerintah dilakukan dengan harapan dapat mendorong perubahan dan implementasi kebijakan yang lebih baik, sebagai upaya untuk melindungi buruh migran. Tidak jarang Migrant CARE berkontribusi dalam penyusunan serta revisi undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia (PPMI) dengan memberikan masukan serta

¹⁶Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017> diakses pada 20 Juni 2024.

menyampaikan berbagai aspirasi pekerja migran dengan didasarkan pada data lapangan dan kebutuhan aktual para pekerja migran.¹⁷ Disisi lain juga mengadakan konsultasi dan diskusi publik, dengan diadakannya forum-forum ini diharapkan pemerintah dan stakeholder lainnya dapat lebih peduli dalam membahas isu-isu mengenai buruh migran.

2. Penanganan Kasus

Sebagai upaya dalam menangani berbagai kasus buruh migran yang mengalami permasalahan di luar negeri Migrant CARE berkolaborasi dengan beberapa instansi pemerintah diantaranya. Pertama, Kementerian Luar Negeri. Migrant CARE menjalin kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan diplomatik dengan tujuan untuk menyelamatkan, memulangkan serta menyelesaikan berbagai masalah hukum buruh migran di negara penempatan. Migrant CARE berperan aktif dalam diplomasi perlindungan sebagai fasilitator antara keluarga buruh migran dengan kementerian luar negeri untuk tindakan diplomatik mulai dari bantuan hukum, penyelamatan hingga mediasi. Kedua, Kementerian Ketenagakerjaan. Migrant CARE dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam upaya membantu serta menyediakan bantuan hukum dan mediasi bagi buruh migran yang mengalami permasalahan ketenagakerjaan. Ketiga, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Migrant CARE melakukan koordinasi dengan BP2MI dalam melakukan pengawasan dan penanganan berbagai kasus hingga pemulangan buruh migran yang bermasalah. Selain itu juga menyediakan layanan terpadu bagi buruh migran yang kembali ke Indonesia seperti bantuan medis, psikologis hingga reintegrasi ke masyarakat.

3. Pendampingan dan konseling

Selain melakukan advokasi kebijakan serta penanganan kasus Migrant CARE juga menyediakan layanan pendampingan serta

¹⁷Migrantcare.net 2023. "Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" pada <https://migrantcare.net/2017/12/undang-undang-no-18-tahun-2017-tentang-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/> diakses pada 22 juni 2024.

konseling bagi buruh migran. Serta memberikan dukungan secara psikososial dan juga rehabilitasi sebagai fasilitas bagi para pekerja migran dalam proses pemulihan bagi yang terkena dampak perdagangan manusia atau eksploitasi. Migrant CARE melakukan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan negosiasi serta berhasil mendirikan berbagai tempat perlindungan sementara bagi pekerja migran yang menjadi korban pengekangan dan perdagangan manusia. Sebagai upaya dalam menghadapi berbagai tantangan sebagai resiko yang dihadapi pekerja migran, Migrant CARE bergerak sebagai advokat bagi kepentingan para pekerja migran dengan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui, dihormati dan dilindungi. Migrant CARE sebagai sebuah lembaga memiliki komitmen tinggi dalam melindungi berbagai hak pekerja migran serta memiliki peran yang vokal dalam mengadvokasi dan memperjuangkan hak-hak pekerja migran. Organisasi menjadi media bagi pekerja migran untuk menyampaikan berbagai aspirasi mereka. Migrant CARE memiliki kesadaran bahwa pemberdayaan serta pengakuan hak individu merupakan kekuatan utama, oleh karena itu Migrant CARE aktif dalam memperjuangkan berbagai hak pekerja migran melalui kampanye advokasi, dialog dengan pemangku kepentingan hingga berpartisipasi dalam berbagai forum internasional yang relevan.¹⁸

Tentunya Migrant CARE merangkul pemerintah dalam hal pelatihan dan penyuluhan. Salah satunya bersama kementerian ketenagakerjaan memberikan pelatihan serta penyuluhan mengenai hak-hak buruh migran sebelum para buruh migran berangkat. Serta melakukan kerjasama dengan perwakilan pemerintahan di luar negeri seperti Kedutaan dan konsulat untuk melakukan penyuluhan bagi buruh migran mengenai hak mereka hingga layanan yang tersedia

¹⁸Ardabili, Y., Sudarso, G. B., & Lestari, P.S. 2023. Permohonan Pengaduan Kasus Pekerja Migran Indonesia di Divisi Bantuan Hukum Migrant CARE. *Jurnal Pendidikan sains dan Komputer*, 3, 14.

selama bekerja di negara tujuan.¹⁹ Migrant CARE juga menyediakan layanan pengaduan hotline serta online untuk buruh migran yang mengalami masalah di luar negeri, yang kemudian pengaduan tersebut akan diturunkan ke pihak bersangkutan yang ada di pemerintahan untuk ditindaklanjuti.

4.2. Migrant CARE Sebagai Arena dalam Membangun Jaringan

Arena. Pada konteks organisasi atau lembaga internasional arena yang dimaksud adalah adanya peran organisasi internasional dalam mengadakan sebuah forum yang dihadiri oleh negara anggota organisasi tersebut dalam menghadapi suatu isu yang sedang terjadi yang dimana output dari forum tersebut adalah terbentuknya sebuah konvensi, perjanjian ataupun persetujuan. Sebuah lembaga internasional harus bisa mengadakan forum yang bersifat netral dan inklusif. Forum tersebut netral sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media untuk bertukar ide dan saling bekerjasama antar anggota serta inklusif yang berarti keanggotaan forum dan berbagai kebijakan yang terbentuk dapat dilaksanakan secara terbuka. Lembaga internasional memiliki peran krusial dalam hal menjadi fasilitator kerjasama antar negara, lembaga tersebut dapat mengurangi ketidakpastian dan memfasilitasi informasi yang lebih terbuka. Hal tersebut memiliki pengaruh baik dimana dapat mengurangi kemungkinan konflik yang akan terjadi dan meningkatkan kepercayaan antar negara. Melalui interaksi yang terjadi secara berulang serta berkesinambungan dalam kerangka lembaga internasional, negara membangun kepercayaan satusama lain. Tingkat kepercayaan tersebut berpengaruh pada terciptanya lingkungan yang kondusif untuk kerjasama dalam jangka panjang. Lembaga internasional mengadakan forum untuk negara bernegosiasi dalam penyelesaian sengketa. Pada forum tersebut negara dapat melakukan dialog mengenai berbagai isu yang menjadi kepentingan

¹⁹Dita Aprilia Yuwanti, 2021. "Indonesian Government's Efforts to Cooperate with Malaysia's Government in Protecting Educational Right of Indonesian Migrant Workers Children (Case Study: Children of Indonesian Migrant Workers in Sabah). Jurnal ASEAN Dynamics and Beyond Vol. 2 No. 2

bersama juga sebagai mediator atau arbitator dalam upaya penyelesaian sengketa hingga membantu negara dalam menemukan jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak.

Sebagai organisasi non pemerintah yang berbentuk non-profit tentunya Migrant CARE tidak dapat melakukan berbagai tugas dalam mengawal kasus secara mandiri. Tentunya bantuan dari pihak pemerintah serta berbagai jaringan lain diperlukan untuk menjalankan perannya. Kerjasama antara pemerintah dengan NGO perlu dilakukan dengan mempersempit kesenjangan budaya, kekuasaan, sumber daya dan perspektif agar tujuan bersama dalam menjalankan berbagai program dapat tercapai.²⁰ Sebagai upaya dalam menangani berbagai kasus pekerja migran, salah satunya Migrant CARE membentuk kerjasama dengan Tenaganita yang merupakan organisasi yang bergerak pada bidang hak asasi manusia di Malaysia. Organisasi memiliki tujuan untuk membantu, membina dan melindungi pendatang dari tindak eksploitasi, diskriminasi, perbudakan hingga perdagangan manusia.²¹ Terdapat sekitar 2 juta pekerja asing yang berada di Malaysia, dimana 1,5 juta pekerja migran tersebut berasal dari Indonesia, Tenaga wanita menerima berbagai pengaduan dari pekerja migran. Jika terdapat pengaduan dari pekerja migran Indonesia, maka mereka akan meneruskan aduan ke *Migrant CARE* yang selanjutnya melakukan pembagian tugas.

Migrant CARE memperkuat jaringan pada berbagai tingkatan mulai dari lokal, nasional, regional hingga global dalam upaya advokasi kebijakan yang memiliki keberpihakan terhadap buruh migran. Migrant CARE juga memanfaatkan teknologi informasi dalam memaksimalkan pelayanan serta kampanye dalam menggalang dukungan publik untuk menciptakan migrasi yang aman.²² Salah satu upaya yang dilakukan oleh Migrant CARE adalah membangun jaringan dengan komunitas pekerja migran Indonesia di Malaysia. Hal tersebut memungkinkan

²⁰David Lewis dan Nazneen Kanji. 2009: Non-Governmental Organization and Development. Routledge. Hal 91

²¹Tenaganita. "Who we Are" pada <https://tenaganita.net/our-story/> diakses pada 25 Juni 2024.

²²Migrantcare.net 2023. "Program Migrant CARE" pada <https://migrantcare.net/program/> diakses pada 20 Mei 2024.

mereka mengetahui kondisi yang sesungguhnya mengenai permasalahan yang dihadapi para buruh migraine sehingga dapat memberikan berbagai bantuan yang dibutuhkan.²³

Selain berbagai upaya diatas, Migrant CARE juga melakukan berbagai upaya lain dalam memperluas jaringannya. Hal tersebut dilakukan agar semakin mudahnya dalam melakukan berbagai upaya perlindungan terhadap para pekerja migran. Adapun upaya tersebut adalah sebagai berikut.

a. Penelitian dan publikasi

Sebagai upaya meningkatkan kinerja dalam advokasi, migrain melakukan penelitian mengenai bagaimana kondisi buruh migran di luar negeri. Kemudian setelah penelitian dilakukan, laporan disusun dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai dasar pembentukan kebijakan oleh pemerintah juga mendukung advokasi berbasis data. Penelitian lapangan dilakukan guna mengumpulkan data yang akurat langsung dari buruh migran untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang bersifat mendesak. Kemudian dilakukan publikasi laporan yang menggambarkan situasi buruh migran dengan lengkap dan memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret. Tentunya dalam melakukan penelitian Migrant CARE menjalin kemitraan dengan akademisi dan lembaga riset agar studi lebih mendalam mengenai berbagai aspek kehidupan buruh migran dapat dilakukan.

b. Kemitraan dengan lembaga internasional

Tentunya migran care tidak dapat menjalankan berbagai tugas tanpa bantuan pihak lain. Migrant CARE menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga internasional. International labour organization (ILO) dan International Organisation for Migration (IOM) merupakan dua organisasi internasional yang dipilih Migrant CARE untuk menjalin kemitraan dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan bagi buruh migran melalui berbagai program yang didukung oleh pemerintah.²⁴ Kemudian juga melibatkan pemerintah pada proyek

²³Hidayah 2019. Strategi Migrant CARE dalam upaya perlindungan buruh migran indonesia di malaysia.

²⁴Iskandar, Nursiti. 2021. "Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang Indonesia. Jurnal Hak Asasi Manusia. Vol 12, No. 3.

kerjasama dalam memperkuat sistem perlindungan bagi buruh migran, salah satunya yaitu dengan meningkatkan kapasitas lembaga terkait. Serta mengadakan dan berpartisipasi dalam berbagai workshop internasional yang mengikutsertakan perwakilan pemerintah dengan tujuan agar semakin kuatnya kerjasama lintas negara.

c. Kampanye publik

Sebagai upaya menyadarkan kesadaran publik serta dengan tujuan agar masyarakat teredukasi migran care mengkampanyekan berbagai isu yang dihadapi oleh buruh migran. Migrant CARE terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam melakukan kampanye agar bisa memberikan jangkauan yang lebih luas. Media massa dan media sosial dimanfaatkan sebagai platform untuk menyebarkan berbagai informasi mengenai hak-hak buruh migran dan isu-isu yang mereka hadapi. Kemudian mengadakan acara publik dengan tujuan edukasi demi meningkatnya kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan buruh migran.²⁵ Serta terus melakukan kampanye anti-Trafficking dengan menggandeng pemerintah dan melakukan kampanye bersama untuk melawan perdagangan manusia dan eksploitasi buruh migran.²⁶

Dengan berbagai langkah tersebut Migrant CARE berperan penting dalam memperjuangkan berbagai hak buruh migran dengan memastikan adanya perlindungan yang memadai bagi mereka melalui kerjasama yang Solid dengan berbagai instansi pemerintah.

4.3. Migrant CARE sebagai Aktor dalam upaya pemberdayaan

Organisasi internasional sebagai aktor artinya adalah dapat bersifat independen di mana tidak adanya tindakan yang dilakukan karena adanya intervensi atau arahan dari pihak lain. Pada beberapa kasus organisasi

²⁵Abdul Gafur R. Sarabiti. 2018. "Peran Program Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) dalam Meminimalisir Human Trafficking di Kabupaten Lembata.

²⁶Irfan Wahyudi. 2022. "Kampanye Melawan Perdagangan Manusia" Kompas.id pada <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/08/17/kampanye-melawan-perdagangan-manusia> diakses pada 23 Juni 2024.

internasional memiliki kecenderungan bersifat dependen terhadap anggotanya sendiri, artinya organisasi tersebut merupakan sebuah bentuk cerminan dari tujuan kolektif para anggotanya atau dengan kata lain organisasi sebagai instrumen untuk merealisasikan tujuan pada tingkat internasional. Pada dasarnya negara-negara tidak hanya berinteraksi dalam kondisi anarki, akan tetapi juga dipengaruhi oleh adanya norma, aturan dan institusi yang dibentuk bersama. Lembaga internasional dapat berperan membantu dalam mengatur perilaku negara dan mempromosikan berbagai norma tertentu. Lembaga tersebut menjadi media untuk negosiasi, penyelesaian sengketa hingga koordinasi kebijakan. Lembaga internasional mempengaruhi cara negara berinteraksi satu sama lain dengan menciptakan sebuah struktur yang memungkinkan tujuan kerjasama lebih mudah tercapai meskipun dalam sistem internasional yang anarki. Negara memiliki kepentingan bersama yang bisa diwujudkan dengan melakukan kerjasama. Stabilitas ekonomi global, perlindungan lingkungan hingga pencegahan konflik menjadi tujuan negara yang dimana memerlukan kerjasama yang terorganisir melalui lembaga internasional dalam upaya mewujudkannya. Kerjasama internasional tentunya tidak selalu membutuhkan adanya otoritas sentral atau pemerintahan dunia. Akan tetapi, interdependensi ekonomi dan politik bisa menjadi salah satu penyebab kerjasama terbentuk karena hal tersebut menciptakan insentif bagi negara. Kerjasama tersebut dapat dilakukan melalui lembaga internasional.

Berbagai masalah dihadapi oleh pekerja migran Indonesia yang sedang bekerja atau yang mau bekerja di luar negeri. Salah satu masalah yang cukup serius dampaknya adalah para pekerja migran Indonesia seringkali bermasalah dari tahap awal perekrutan, hal tersebut menyebabkan banyaknya yang terjerumus pada perdagangan manusia. Pada dasarnya orang yang menjadi korban perdagangan manusia ini memiliki harapan agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik serta dapat memperbaiki kondisi ekonomi dengan cara bekerja di luar negeri akan tetapi apa yang didapat adalah eksploitasi hingga perdagangan manusia. Pada tahun 2018 tercatat setidaknya 141 pekerja migran Indonesia yang didominasi oleh perempuan mengalami kasus

perdagangan manusia.²⁷ Fenomena perdagangan manusia tersebut seringkali terjadi pada pekerja migran perempuan yang tidak memiliki kebiasaan serta berasal dari pedesaan dengan tingkat pendidikan yang rendah yang membuat mereka tidak punya pilihan lain selain menjadi pekerja migran di luar negeri. Banyak faktor yang mendorong banyak orang untuk bekerja di luar negeri, sebagian besar dikarenakan kemiskinan, lapangan kerja yang sedikit serta karena adanya pergeseran orientasi pembangunan yang berawal dari pertanian menjadi industri dan karena adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan.²⁸

Fenomena menjadi pekerja migran ini sudah menjadi salah satu fenomena global bahkan ini menjadi bisnis global yang memberikan keuntungan besar bagi pelaku. Tetapi para pekerja migran belum bisa terlindungi secara sepenuhnya oleh peraturan pekerja migran baik di negara pengirim maupun negara tujuan. Salah satu penyebab hal tersebut terjadi adalah karena pekerja migran didominasi oleh perempuan dan rata-rata bekerja pada kondisi yang privat atau rumah pribadi yaitu dengan menjadi asisten rumah tangga, hal ini tentunya merupakan pekerjaan yang tersembunyi dari pengamatan masyarakat yang akibatnya adanya satu kondisi yang menjadikan mereka rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi.

Program Desbumi atau Desa Peduli Buruh Migran merupakan inisiatif yang dicetuskan oleh Migrant CARE dalam upaya meningkatkan pemberdayaan buruh hingga perlindungan migran pada tingkat desa. Adanya program ini, diharapkan dapat menciptakan sebuah sistem perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran dimulai dari desa asal mereka dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah desa, organisasi masyarakat hingga komunitas lokal.²⁹

Program ini memiliki berbagai tujuan diantaranya:

²⁷ Ibid.,

²⁸ A. Wahyu Rudhanto. 2019. Kerjasama antar negara dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) (Studi Kasus Kerjasama Indonesia-Malaysia). Jakarta: Jurnal Ilmu Kepolisian.

²⁹ Yudha Satriawan. 2020. "Desbumi, Pemberdayaan Desa Pekerja Migran" dalam <https://www.voaindonesia.com/a/desbumi-pemberdayaan-desa-pekerja-migran-/5470406.html> diakses pada 26 Juni 2024.

1. Pemberdayaan ekonomi. Program ini mencoba mendorong warga desa terutama yang memiliki pengalaman menjadi pekerja migran untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif. Sebagai salah satu contohnya desa Gerunung di wilayah Lombok Tengah yang memproduksi berbagai barang seperti masker hingga makanan olahan. Hal ini sangat membantu menciptakan sumber penghidupan alternatif serta mengurangi ketergantungan pada pekerjaan migran.
2. Penguatan kapasitas serta kepemimpinan perempuan. Program ini mencoba membentuk kelompok-kelompok perempuan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan sosial. Hal ini juga termasuk memberikan pelatihan keterampilan, pengembangan kapasitas kepemimpinan hingga pengorganisasian perempuan agar berperan aktif dalam pembangunan desa.³⁰
3. Advokasi kebijakan. Program ini juga berperan penting dalam advokasi kebijakan yang memiliki tujuan agar adanya perlindungan yang lebih baik untuk buruh migran. Salah satunya adalah mendorong upaya agar diperkuatnya implementasi Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola migrasi tenaga kerja pada tingkat lokal hingga nasional.
4. Revitalisasi ekonomi desa. Salah satu tujuan utama dari program ini adalah melakukan revitalisasi ekonomi desa agar berkurangnya arus migrasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong pengembangan usaha lokal dan pariwisata desa agar terciptanya lapangan pekerjaan baru serta mendukung ekonomi kreatif lokal sebagai pendukung perekonomian negara.³¹

Sejauh ini program Desa Bumi telah diterapkan Setidaknya di 37 desa yang tersebar di delapan Kabupaten pada lima provinsi di Indonesia termasuk Indramayu, Kebumen, Cilacap, Wonosobo, Jember, Banyuwangi, Lombok Tengah dan Lembata.³² Program Desbumi melakukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya fokus pada perlindungan hukum akan tetapi juga mendorong pemberdayaan

³⁰Migrantcare.net2023. “DESBUMI, Desa Peduli Buruh Migran” pada <https://migrantcare.net/desbumi/> diakses pada tanggal 26 Juni 2024.

³¹Fauzan. “Pengembangan Ekonomi Kreatif Lokal Desa Tumang dengan Pendekatan Komunitas Visual untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”, 149

³²Migrantcare.net 2023. “DESBUMI, Desa Peduli Buruh Migran” pada <https://migrantcare.net/desbumi/#:~:text=DESBUMI%20merupakan%20inisiatif%20multipihak%20di,terutama%20perempuan%20sejak%20dari%20desa.> diakses pada tanggal 26 Juni 2024.

ekonomi dan sosial buruh migran serta keluarganya. Setiap desa memiliki pendekatan yang spesifik, disesuaikan dengan berbagai potensi serta kebutuhan lokal mulai dari pengembangan pariwisata produksi barang hingga usaha mikro. Tentunya dalam implementasinya Migrant CARE tidak bisa bergerak sendiri, seperti halnya dalam program Desbumi ini melibatkan berbagai pihak seperti Pemerintah desa, organisasi masyarakat dan berbagai jaringan sipil lainnya. beberapa kemitraan yang dijalin pada program ini diantaranya kemitraan dengan organisasi lokal yaitu Social Analysis and Research Institute Kota Solo, Perkumpulan Panca Karsa kota Mataram dan Yayasan Kesehatan Untuk Semua kepulauan Lembata.³³

Program Desbumi yang diinisiasi oleh Migrant CARE merupakan inisiatif yang komprehensif dan holistik, dengan memfokuskan tujuan pada pemberdayaan dan perlindungan buruh migran beserta komunitasnya.³⁴ Melalui berbagai pendekatan yang inovatif serta partisipatif program ini memberikan dampak positif yang signifikan serta terus melakukan berbagai upaya untuk memperluas jangkauannya dengan meningkatkan keberlanjutan serta efektivitasnya.

KESIMPULAN

Migrant CARE merupakan organisasi non pemerintah yang berfokus pada perlindungan serta advokasi hak-hak buruh migran Indonesia. Berbagai upaya strategis ditempuh Migrant CARE dalam melakukan advokasi pekerja migran Indonesia di Malaysia selama tahun 2017-2022. Sebagai sebuah organisasi, ada tiga peran utama yaitu sebagai instrumen, arena serta aktor dalam menjalankan berbagai tugas advokasi kebijakan, menangani kasus, memberikan pendampingan hingga menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan organisasi internasional. Salah satu capaian besar Migrant CARE adalah berhasil mendorong revisi undang-

³³Dalhar Shodiq, Tyas Retno Dkk. 2017 "Perlindungan Buruh Migran dari Hulu ke Hilir Melalui Program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi): Studi di Desa Kuripan Wonosobo Jawa Tengah dan Desa Nyerot Lombok Nusa Tenggara Barat," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* Vol. 5 No.2.

³⁴Baiq Ihtiar Nalara Mandalika. "Strategi Pemberdayaan Mantan butuh Migran Wanita: Studi Kasus di Perkumpulan Panca Karsa (PKK) Kota Mataram, 56.

undang mengenai perlindungan pekerja migrant dan mendesak pemerintah untuk mendorong peningkatan perlindungan buruh migran melalui desentralisasi serta pengorganisasian kembali berbagai kebijakan. Migrant CARE juga berperan penting dalam menyediakan berbagai fasilitas bagi korban yang terdampak seperti memberikan dukungan psikososial, rehabilitasi hingga memfasilitasi negosiasi dan mendirikan berbagai tempat perlindungan sementara bagi para pekerja migran.

Berbagai upaya advokasi dilakukan oleh Migrant CARE sebagai upaya memaksimalkan perlindungan terhadap pekerja migran. Kerjasama dijalin dengan berbagai instansi pemerintah dalam melakukan berbagai upaya advokasi tersebut dengan tujuan agar terjadinya perubahan dan implementasi kebijakan kearah yang lebih baik, tentu saja tidak mengabaikan tujuan utamanya yaitu untuk melindungi buruh migran. Hal paling dasar yang dilakukan oleh Migrant CARE adalah melakukan kampanye publik dan mengangkat berbagai isu yang dihadapi para pekerja migran serta mengadakan acara yang dapat dihadiri oleh publik dengan tujuan mengedukasi berbagai hak dan bagaimana pentingnya perlindungan bagi pekerja migran. Program Desbumi merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan oleh Migrant CARE sebagai upaya yang memiliki tujuan akhir agak berkurangnya arus migrasi serta meningkatkan kesejahteraan buruh migran. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan pemberdayaan ekonomi, penguatan kapasitas perempuan hingga mendorong revitalisasi ekonomi desa. Melalui kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah hingga lembaga internasional, Migrant CARE telah memberikan kontribusi yang krusial dalam melakukan perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia. Tujuan utama dalam jangka panjang adalah menciptakan sistem migrasi yang aman dan berkelanjutan.

Sebagai sebuah organisasi internasional Migrant CARE membantu memperjuangkan hak para pekerja migran. Selain itu juga mengkampanyekan anti-trafficking hingga menjadi lembaga yang menyediakan forum untuk negosiasi, penyelesaian sengketa dan koordinasi kebijakan. Peran yang tidak kalah pentingnya adalah mengurangi ketidakpastian dalam hubungan internasional khususnya dalam permasalahan buruh migran, dengan

memastikan tersedianya berbagai informasi yang transparan dan menetapkan kebijakan yang jelas serta meminimalisir risiko konflik dengan membantu negara dalam membuat keputusan yang lebih tepat karena ada informasi dan data yang akurat. Data dan analisis yang dibutuhkan oleh negara disediakan oleh lembaga, sehingga dalam membuat keputusan dapat dilakukan dengan lebih baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Migrant CARE sebagai organisasi juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Archer, Clive. *International Organization*. 3rd ed. London and New York: Taylor and Francis Group, 2001.
- Baldwin, David A. *Neorealism and Neoliberalism: Contemporary Debate*. New York: Columbia University Press, 1993.
- Ikenberry, John G. *After Victory: Institutions, Strategic Restraint and the Rebuilding of Order After Major Wars*. Princeton: Princeton University Press, 2001.
- Jack and Sorenson (2009): *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Pustaka Pelajar: Jakarta).
- Keck & Sikkink. *Activist beyond Borders - Advocacy Networks in International Politics*. (London: Comell University Press),
- Keohane, Robert O. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton: Princeton University Press, 1984.
- Keohane, Robert O., dan Joseph Nye. *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Princeton: Princeton University Press, 1977.
- Lewis, David, dan Nazneen Kanji. *Non-Governmental Organization and Development*. Routledge, 2009.
- Mas'ood Mochtar (1990): *Ilmu hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES).

DOKUMEN DAN JURNAL

- Anisawati, Novia. "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia untuk tenaga Kerja Indonesia." *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 1, no. 4 (2022).
- Ardabili, Y., Sudarso G. B., dan Lestari P. S. "Permohonan Pengaduan Kasus Pekerja Migran Indonesia di Divisi Bantuan Hukum Migrant CARE." *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3 (2023).
- Fauzan. "Pengembangan Ekonomi Kreatif Lokal Desa Tumang dengan Pendekatan Komunitas Visual untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)."
- FIkri, Sultoni. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2022).
- Hidayah. "Strategi Migrant CARE dalam upaya perlindungan buruh migran Indonesia di Malaysia." 2019.
- Iskandar, Nursiti. "Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang Indonesia." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 12, no. 3 (2021).
- Junaidi, M., dan Khikmah. "Perlindungan Hukum dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri." *Jurnal USM Law review* 7, no. 1 (2023).
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Kaleidoskop Perlindungan WNI. Tahun keempat*, 2018.
- Mandalika, Baiq Ihtiar Nalara. "Strategi Pemberdayaan Mantan butuh Migran Wanita: Studi Kasus di Perkumpulan Panca Karsa (PKK) Kota Mataram."
- Puanandini, Dewi Asri. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan orang Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2020).
- Rudhanto, A. Wahyu. *Kerjasama antar negara dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) (Studi Kasus Kerjasama Indonesia-Malaysia)*. Jakarta: *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 2019.
- Safina M., Hamong S. Wahyu, dan S. Wahyu. "Perempuan Pekerja Migran Aktor Pembangunan yang Tertinggal." *Migrant CARE, Indonesia*, 2019.

- Sarabiti, Abdul Gafur R. "Peran Program Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) dalam Meminimalisir Human Trafficking di Kabupaten Lembata." 2018.
- Shodiq, Dalhar, Tyas Retno, dkk. "Perlindungan Buruh Migran dari Hulu ke Hilir Melalui Program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi): Studi di Desa Kuripan Wonosobo Jawa Tengah dan Desa Nyerot Lombok Nusa Tenggara Barat." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 5, no. 2 (2017).
- Solechan, Tri Rahayu, dan Muhamad Azhar. "Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2020).
- Sumardiani, F., & Pengelola Ahli Teknologi Pertanian, B. (2014). Peran Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>
- Upaya Migrant Care Dalam Mendorong Penyelesaian Kasus Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Tahun 2014-2016 (Studi Kasus : Wilfrida Soik) - Repositori Universitas Kristen Indonesia. (n.d.). Retrieved May 17, 2022, from <http://repository.uki.ac.id/3260/>
- UPAYA MIGRANT CARE DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA (2014-2019) - UMM Institutional Repository. (n.d.). Retrieved May 24, 2022, from <https://eprints.umm.ac.id/70617/>
- Widyastuti, Vika T., Irwan Hamzani A., Nuridin, dan Wildan M. "Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap hak-hak Perempuan Tenaga Kerja Migran dalam Mewujudkan Nilai-nilai Keadilan Sosial." *Masyarakat Berdaya dan Inovasi* 1, no. 1 (2020): 6-11. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i1.2>.
- Wijaya, Chandra Kusuma. Upaya BNP2TKI dalam Menanggulangi Human Trafficking TKI di Malaysia tahun 2010-2013. Universitas Diponegoro, 2018.
- Willis, Katie. *Theories and Practices of Development*. USA and Canada: Routledge, 2005.
- Yuwanti, Dita Aprilia. "Indonesian Government's Efforts to Cooperate with Malaysia's Government in Protecting Educational Right of Indonesian Migrant Workers Children (Case Study: Children of Indonesian Migrant

Workers in Sabah)." Jurnal ASEAN Dynamics and Beyond 2, no. 2 (2021).

Zulharman, Rifqathin Ulya. "Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi dalam Upaya Pemenuhan dan Perlindungan HAM Pekerja Migran Indonesia." Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam 2, no. 1 (2022).

WEBSITE

"Perdagangan Manusia dan Korupsi di NTT." Migrant CARE, 2018. Diakses 17 Mei 2024. <https://www.migrantcare.net/2018/03/perdagangan-manusia-dan-korupsi-di-ntt/>.

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." Peraturan BPK, 2024. Diakses 28 Mei 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>.

Advokasi Migrant Care dalam Memperjuangkan Hak – Hak Buruh Migran: Kasus Pengesahan Undang – Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) Repository - UNAIR REPOSITORY. (n.d.). Retrieved May 24, 2022, from <https://repository.unair.ac.id/96586/>

BNP2TKI • Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Tahun 2018. (n.d.). Retrieved May 18, 2022, from <http://portal.bnp2tki.go.id/read/14133/Data-Penempatan-dan-Perlindungan-TKI-Periode-Tahun-2018.html>

Damayanti, Anisa Ulfa. "Ratusan anak jadi korban eksploitasi berkedok magang." Okezone, 2018. Diakses 17 Mei 2024. <https://nasional.okezone.com/read/2018/04/03/337/1881578/ratusan-anak-jadi-korban-eksploitasi-berkedok-magang>.

Fauzi, Moch Prima. "Ini Cara Kemnaker Cegah Perdagangan Manusia di NTT." <https://news.detik.com/berita/d-4113984/ini-cara-kemnaker-cegah-perdagangan-manusia-di-ntt> Detik.com, 2018. Diakses 30 Mei 2024.

INDONESIA.GO.ID. "Peran TKI Hadapi Krisis." Portal Informasi Indonesia, 2019. Diakses 10 Mei 2024. <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/peran-tki-hadapi-krisis>.

Indonesia-Malaysia Sepakati MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia | Sekretariat Negara. (n.d.). Retrieved May 18, 2022, from https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia_malaysia_sepakati_mou_perlindungan_pekerja_migran_indonesia_di_malaysia

Launching Skema Baru KUR Bagi PMI, Menko Airlangga Sebut Pekerja Migran Indonesia Sebagai Pahlawan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved May 17, 2022, from <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3924/launching-skema-baru-kur-bagi-pmi-menko-airlangga-sebut-pekerja-migran-indonesia-sebagai-pahlawan>

MAMPU. "Meningkatkan Kondisi Migrasi Buruh Perempuan ke Luar Negeri." Bappenas, 2024. Diakses 20 Juni 2024. <http://mampu.bappenas.go.id/tema/perlindungan-buruh-migran/>.

Migrant CARE Kuala Lumpur Gelar Sosialisasi tentang Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia. (n.d.). Retrieved May 18, 2022, from <https://migrantcare.net/2018/04/sosialisasi-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-kuala-lumpur-2018/>

Migrantcare.net. "DESBUMI, Desa Peduli Buruh Migran." Migrant CARE, 2023. Diakses 26 Juni 2024. <https://migrantcare.net/desbumi/>.

Migrantcare.net. "DESBUMI, Desa Peduli Buruh Migran." Migrant CARE, 2023. Diakses 26 Juni 2024. <https://migrantcare.net/desbumi/#:~:text=DESBUMI%20merupakan%20inisiatif%20multipihak%20di,terutama%20perempuan%20sejak%20dari%20desa.>

Migrantcare.net. "Program Migrant CARE." Migrant CARE, 2023. Diakses 20 Mei 2024. <https://migrantcare.net/program/>.

Migrantcare.net. "Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." Migrant CARE, 2023. Diakses 22 Juni 2024. <https://migrantcare.net/2017/12/undang-undang-no-18-tahun-2017-tentang-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>.

Satriawan, Yudha. "Desbumi, Pemberdayaan Desa Pekerja Migran." VOA Indonesia, 2020. Diakses 26 Juni 2024.

<https://www.voaindonesia.com/a/desbumi-pemberdayaan-desa-pekerja-migran-/5470406.html>.

Tenaganita. "Who we Are." Tenaganita, 2024. Diakses 25 Juni 2024. <https://tenaganita.net/our-story/>.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (n.d.). Retrieved May 18, 2022, from <https://migrantcare.net/2017/12/undang-undang-no-18-tahun-2017-tentang-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>

Upaya Preventif Dalam Menekan Insiden Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Melalui Hubungan Bilateral Indonesia Dan Malaysia | Dikshi (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional). (N.D.). Retrieved May 18, 2022, From [https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Hi/Article/View/52462?Articlesby sameauthorpage=4](https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Hi/Article/View/52462?Articlesby%20sameauthorpage=4)

UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved May 18, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40786/uu-no-39-tahun-2004>

Wahyudi, Irfan. "Kampanye Melawan Perdagangan Manusia." Kompas.id, 2022. Diakses 23 Juni 2024. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/08/17/kampanye-melawan-perdagangan-manusia>.